

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
ABSTRAK	iv
<i>ABSTRACT</i>	v
RINGKASAN DISERTASI.....	vi
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	22
C. Tujuan Penelitian	22
D. Kegunaan Penelitian	23
E. Kerangka Konseptual.....	23
F. Kerangka Teori	28
1. Teori Keadilan	28
2. Teori Negara Hukum	40
3. Teori Demokrasi	48
4. Teori Penegakan Hukum	50
G. Kerangka Pemikiran	52

H. Orisinalitas Penelitian	53
I. Metode Penelitian	61
1. Metode Pendekatan	61
2. Spesifikasi Penelitian	62
3. Sumber Data	63
4. Teknik Pengumpulan Data.....	65
5. Analisis Data.....	65
J. Sistematika Penulisan	67
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Demokrasi.....	69
1. Demokrasi Langsung	73
2. Demokrasi Perwakilan.....	74
B. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah	75
C. Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia.....	82
D. Lembaga Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah	104
BAB III HAKEKAT PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI INDONESIA	
A. Filosofi Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	109
B. Pengawasan Pemilihan Kepala Daerah.....	110
C. Penyelesaian oleh Mahkamah Konstitusi	115
D. Penyelesaian oleh Pengadilan Tata Usaha Negara	132
E. Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilihan Umum.....	162
F. Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.....	173

G. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI.2013	183
BAB IV PROBLEMATIKA PENYELESAIAN SENGKETA DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH	
A. Problematika Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Pilkada.....	211
1. Dilema Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah sebagai Instrumen Penguatan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	211
2. Pelanggaran Dalam Pemilihan Kepala Daerah.....	215
B. Problematika Kekuasaan Lembaga Peradilan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah.....	222
1. Konsep Demokrasi dan Penegakan Hukum	222
2. Lahirnya Kekuasaan Lembaga Peradilan dalam Penyelesaian Pelanggaran Pilkada	232
a. Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah dari Kekuasaan MA menjadi Kekuasaan MK	232
b. Kekuasaan PTUN dalam mengadili Keputusan Penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah	239
c. Kekuasaan Pengadilan Umum dalam menangani Pelanggaran Pidana Pemilihan Kepala Daerah.....	242
d. Penegakan Kode Etik oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum.....	246

C. Analisis Putusan Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	250
D. Problematika Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah	333
BAB V REKONSTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA DALAM MEWUJUDKAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH YANG DEMOKRATIS BERBASIS NILAI KEADILAN	
A. Penyelenggaraan Pemilihan Umum Yang Demokratis.....	345
B. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah Menurut Prinsip Demokrasi	355
C. Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum di Beberapa Negara	375
D. Pemilihan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam	385
1. Demokrasi	385
2. Pilkasa Syura	387
3. Money Politic	391
4. Golongan Putih.....	395
E. Perbandingan Pengadilan Khusus Pemilihan Umum di Berbagai Negara	397
1. <i>Corte Electoral</i> di Uruguay	398
2. <i>Tribunal Superior Eleitoral</i> di Brazil.....	400
3. <i>Tribunal Supremo de Elecciones</i> di Costa Rica	402
F. Rekonstruksi Dalam Mewujudkan Pemilihan Kepala Daerah Yang Demokratis Berbasis Nilai Keadilan.....	404

BAB VI PENUTUP

A. Ssimpulan.....	430
B. Saran	432
C. Implikasi Kajian Disertasi	
1. Implikasi Teoritis.....	433
2. Implikasi Praktis	434

DAFTAR PUSTAKA